

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT,
DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : REZKY AGUNG

NIM : 126232176

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT,
DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : REZKY AGUNG

NIM : 126232176

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT,
DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Rezky Agung

126232176

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak, CA.

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal untuk mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), opini audit, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021–2023, yang mencakup 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan total 81 data observasi. Teknik analisis yang diterapkan adalah regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen (PAD, opini audit, dan ukuran pemerintah daerah) dan variabel dependen (kinerja keuangan) yang diukur menggunakan rasio kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Opini Audit; Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Financial performance of regional governments is an indicator of regional ability to manage finances independently, which has implications for increasing fiscal capacity to encourage regional development. This research aims to analyze the influence of Original Local Government Revenue, audit opinions, and regional government size on the financial performance of regional governments in districts/cities of West Java Province. The data used is secondary data from the 2021–2023 Regional Government Financial Report, which covers 27 Regencies/cities in West Java with a total of 81 observation data. The analysis technique applied is multiple regression to test the relationship between the independent variables (Original Local Government Revenue, audit opinions, and regional government size) and the dependent variable (financial performance) which is measured using the independence ratio. The research results show that Original Local Government Revenue has a positive and significant effect on financial performance of regional governments. Audit opinions have a positive but insignificant influence on financial performance of regional governments. Meanwhile, regional government size has a insignificant negative effect on financial performance of regional governments.

Keywords: *Financial performance of regional governments; Original Local Government Revenue; Audit Opinion; regional government size.*

KATA PENGANTAR

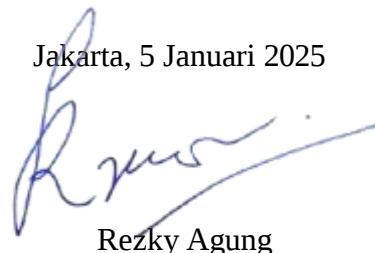
Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara, atas dukungannya dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, atas arahan dan dukungannya;
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, selaku Ketua Program Studi PPAk, atas dedikasinya selama proses pendidikan;
5. Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan arahnya yang penuh kesabaran;
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Program Studi PPAk atas ilmu dan pengalaman yang diberikan; serta
7. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat yang selalu mendukung dan menyemangati selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, namun besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat sebagai referensi akademik dan bahan diskusi. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan terbuka untuk menerima saran serta masukan demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Jakarta, 5 Januari 2025



Rezky Agung

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	5
2.1.2. Kinerja keuangan pemerintah daerah	6
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.1.4. Opini Audit.....	9
2.1.5. Ukuran Pemerintah Daerah (UPD).....	10
2.2. Perumusan Hipotesis.....	10
2.2.1. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.2.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.2.3. Pengaruh UPD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.3. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Jenis Penelitian.....	15
3.2. Populasi.....	15
3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran	15
3.4. Jenis Data dan Sumber Data	16
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6. Teknik Analisis Data.....	17
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	17
3.6.2. Asumsi Klasik	17
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda	18

3.6.4. Uji Hipotesis.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Statistik Deskriptif	20
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	21
4.2.1. Uji Normalitas	21
4.2.2. Uji Multikolinearitas.....	22
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	23
4.3. Uji Hipotesis	24
4.3.1. Uji Koefisien Determinasi.....	24
4.3.2. Uji Simultan (Uji f)	24
4.3.3. Uji Parsial (Uji T).....	25
BAB V PENUTUP.....	28
5.1. Simpulan	28
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	28
5.3. Saran	29
REFERENSI	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif variabel dependen dan independen	20
Tabel 4.2. Uji Normalitas residual awal dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	21
Tabel 4.3. Uji Normalitas residual setelah transformasi dengan <i>Kolmogorov - Smirnov</i>	22
Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas.....	22
Tabel 4.5. Uji Heteroskedastisitas	23
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>R-Square</i>	24
Tabel 4.7. Hasil Uji F.....	24
Tabel 4.8. Hasil Uji T.....	25

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Kerangka Pemikiran.....	14
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu parameter dalam melihat pengelolaan keuangan daerah adalah dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik berimplikasi pada pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang optimal. Dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, hal ini mampu menjadi penggerak serta mendorong pembangunan daerah yang maksimal, sekaligus mendukung upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan mandiri. Salah satu metode pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui rasio kemandirian daerah, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam memenuhi pendapatan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola aparatur pemerintahan secara mandiri dan menjalankan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, penerapan desentralisasi memungkinkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan daerah masing-masing serta potensi untuk menggali sumber pendapatan daerah. Dalam pelimpahan wewenang desentralisasi, salah satu pilar utamanya adalah pelimpahan wewenang penerimaan. Pilar ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendanaan atas keputusan pembelanjaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, sehingga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opini Audit, dan Ukuran Pemerintah Daerah (UPD). Dalam penelitian ini, ketiga faktor tersebut digunakan sebagai variabel independen, sedangkan rasio kemandirian daerah digunakan sebagai variabel dependen.

Faktor pertama adalah PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pengelolaan PAD dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Bentuk PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Faktor kedua adalah Opini Audit. Opini audit merupakan pendapat yang diberikan auditor setelah memeriksa laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan tersebut. Opini audit penting karena dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga adalah UPD yang merupakan salah satu variabel yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu pemerintahan daerah, yang dapat diukur melalui total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total aset. Total aset digunakan karena mencerminkan kapasitas keuangan, kekayaan, dan sumber daya yang dimiliki daerah secara lebih stabil dan objektif dibandingkan variabel lain, seperti pendapatan atau jumlah pegawai, yang cenderung fluktuatif. Total aset mencakup infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan.

Penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian atas pengaruh beberapa faktor tersebut terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Syahwildan (2022), Damayanti (2022), dan Kirono (2022) menunjukkan bahwa PAD secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilqis (2023) dan Priyono (2023), serta Wahyudin (2020) dan Hastuti (2020), yang sama-sama menyimpulkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian atas faktor opini audit, penelitian yang dilakukan oleh Zahrah (2024), Zaen (2024), dan Mellinia (2024) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya atas faktor UPD penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dan Amanah (2020) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif

secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh atas PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh atas Opini Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh atas UPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk melihat hubungan atas pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah;
2. Untuk melihat hubungan atas pengaruh Opini Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; dan
3. Untuk melihat hubungan atas pengaruh UPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjabaran diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan faktor-faktor yang dianalisis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan strategi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan PAD, peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, serta pengoptimalan penggunaan dan pengelolaan aset daerah diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan evaluasi. Hal ini akan mendukung pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Bagi lembaga legislatif

Sebagai instansi legislatif yang memiliki fungsi penganggaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi tersebut, khususnya dalam membahas dan memberikan persetujuan atas RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga mampu mengevaluasi pencapaian PAD, Opini Audit, serta pengelolaan aset. Hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih optimal.

3. Bagi masyarakat

Sebagai pihak yang terdampak langsung oleh setiap kebijakan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat umum mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di masing-masing wilayah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan dan masukan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Masyarakat, sebagai salah satu objek pajak, dapat memberikan masukan atas pengelolaan PAD serta turut mendukung pengoptimalan aset infrastruktur layanan publik yang mereka gunakan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

REFERENSI

- Andrews, & Lorraine. (2012). Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections. *The Grounded Theory Review Volume 11, Issue 1*, 12-26
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 613–621. <https://journal.45mataram.ac.id/index.php/economina>.
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen keuangan daerah*. Semarang: Eureka Media Aksara.
- Endiana, I. D. M., & Suryandari, N. N. A. (2021). Opini Going Concern: Ditinjau Dari Agensi Teori Dan Pemicunya. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(2), 224–242. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490>
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edward Tanujaya. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. & Kusufi. 2019. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Bandung: Salemba Empat.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi.Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES*.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja keuangan pemerintah daerah* (Cetakan ke-2). Makassar: DE LA MACCA. ISBN 978-602-263-131-6.
- Purwanto, E.A. dan D.R. Sulistyastuti. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Edisi Kedua. Gava Media. Yogyakarta.

- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Sari, I.P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jom Fekom* 3(1): 679-692.
- Syahwildan, M., Damayanti, T., & Kirono, C. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pelita Manajemen*, 1(2), 185–192.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Zahrah, F. A., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 370–384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>.